

ABSTRAK

Muhammad Idham Chalid: “Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Kabupaten Kubu Raya Periode 2019 – 2024”. Permasalahan dalam penelitian ini bersumber pada rendahnya (estimasi) fungsi anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan fungsi legislasi. Di samping itu terbatasnya waktu dalam penyusunan/penetapan Perda tersebut, sehingga masih banyaknya Perda baik dari usulan Bupati maupun inisiatif dewan masih ada yang belum dibahas atau ditetapkan. Tujuan dalam penelitian ini adalah ingin menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan fungsi badan legislasi DPRD dalam penyusunan Raperda Kabupaten Kubu Raya dari tahun 2017 – 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan legislasi DPRD Kabupaten Kubu Raya dalam penyusunan Raperda, pada kenyataannya belum sesuai dengan harapan. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya: kemampuan anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya, dilihat dari tingkat pendidikan secara umum relatif cukup tinggi. Namun mengenai kemampuan anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi dalam penyusunan Raperda belum sesuai dengan harapan. Pemanfaatan fasilitas teknis dan administratif oleh anggota DPR dalam menjalankan proses legislasi masih terlihat belum maksimalnya. Hal tersebut Raperda yang dihasilkan DPRD Kabupaten Kubu Raya periode 2019-2024 relatif masih rendah, Kerjasama yang dilakukan antara anggota DPRD dalam menyusun dan membentuk kebijakan, masih terjadinya tarik menarik kepentingan dalam proses legislasi dalam DPRD sehingga hilangnya salah satu tugas wewenang Badan Legislasi dalam mengajukan usulan RUU. Saran untuk penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan para anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya dalam menjalankan fungsi legislasi tersebut dimana partai politik berkewajiban mempersiapkan para kadernya secara lebih terencana untuk menjadi anggota legislatif yang berkualitas.

Kata kunci: Pelaksanaan, Fungsi Legislasi DPRD, Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

ABSTRACT

Muhammad Idham Chalid: " *The Implementation of the Functions of the Regional House of Representatives in the Compilation of the Draft of Regional Regulation in the District of Kubu Raya for the period of 2019 - 2024*". The problem in this study stems from the low (estimated) function of the Kubu Raya Regency DPRD member in carrying out the legislative function. In addition, there is limited time in drafting / stipulating of these Perda, so that there are still many Perda, both from the Regent's proposal and the council's initiative, which have not yet been discussed or stipulated. The purpose of this study is to describe and analyze the implementation of the functions of the DPRD legislative body in the preparation of the Kubu Raya Regency Raperda from 2019 - 2021. The results of the study indicate that the results of the study indicate that the implementation of the Kubu Raya Regency DPRD in the drafting of the Raperda, in reality is not in line with expectations . This can be seen from several indicators including: the ability of Pontianak City DPRD members, viewed from the level of education in general is relatively high. However, the ability of DPRD members to carry out the legislative function in drafting the draft regulation is not in line with expectations. Utilization of technical and administrative facilities by DPR members in carrying out the legislative process still seems to be not maximized. The Draft Regulation produced by Pontianak City DPRD in 2019-2024 period is still relatively low. Cooperation between DPRD members in formulating and shaping policies, there is still a conflict of interest in the legislative process in the DPRD so that the loss of one of the Legislative Body's authority tasks in submitting the proposed bill .

Keywords: *Implementation, Legislative Function of DPRD, Preparation of Regional Regulation Draft.*